



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta Selatan 12072,  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

---

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 470.05 - 57 DUKCAPIL TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 470.05-02 DUKCAPIL TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN BIMBINGAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.05-02 DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.05-02 DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2016;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Keputusan Presiden Nomor 90/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1449);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Merubah Lampiran dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.05-02 DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2016,

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2018

An. MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
9. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Para Pejabat Eselon II/Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Para Anggota Tim Fasilitasi dan Bimbingan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2018.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 470.05 – 57 DUKCAPIL TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR 470.05-02 DUKCAPIL TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM FASILITASI DAN BIMBINGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM FASILITASI DAN BIMBINGAN PENYELENGGARAAN  
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tjahjo Kumolo	Menteri Dalam Negeri	Pembina
II.	Hadi Prabowo	Plt. Sekretaris Jenderal	Pengarah
III.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab
IV.	Ir. I Gede Suratha, MMA	Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab Administrasi
V.	Penyelenggara		
<b>WILAYAH I</b> (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau)			
1.	<b>Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M.M.</b>	<b>Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Koordinator Wilayah I</b>
2.	Amaliana Tri Murti, S.Sos, M.Si	Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Pendaftaran Penduduk	Wakil Koordinator
3.	M. Arief Affandi, SE, Ak, M.Acc	Kasubdit. Wilayah I, Dit Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
<b>PROVINSI ACEH</b>			
4.	Parjiya, S.Sos, M.Si	Kasubdit Fasilitasi Pendataan Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab: Provinsi Aceh dan Penanggung jawab Kab/Kota: 1. Kab. Bireun 2. Kab. Pidie 3. Kab. Pidie Jaya 4. Kab. Bener

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Meriah 5. Kab. Aceh Besar 6. Kota Banda Aceh 7. Kota Sabang
5.	Sri Endah Wahyuningpuri, S.IP	Plt. Kasi Monitoring dan Evaluasi, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab: 1. Kab. Aceh Jaya 2. Kab. Aceh Barat 3. Kab. Nagan Raya 4. Kab. Aceh Utara 5. Kota Lokhseumawe 6. Kab. Aceh Tengah 7. Kab. Gayo Luwes 8. Kab. Aceh Tenggara
6.	Sesario Fernandes, S.STP.	Staf Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab: 1. Kab. Aceh Timur 2. Kab. Aceh Tamiang 3. Kota Langsa 4. Kab. Semelue 5. Kab. Aceh Barat Daya 6. Kab. Aceh Selatan 7. Kab. Aceh Singkil 8. Kota Sabulussalam
<b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b>			
7.	Abdul Gafur, S.STP, M.Si	Kasubdit Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab: Provinsi Sumatera Utara dan Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Karo 2. Kab. Dairi 3. Kab. Pak-Pak Bharat 4. Kab. Batubara 5. Kab. Simalungun 6. Kota Pematang Siantar

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			7. Kab. Langkat 8. Kota Binjai 9. Kota Medan 10. Kab. Humbang Hasundutan 11. Kab. Toba Samosir 12. Kab. Samosir
8.	Fajar Kurniawan A, SH	Kasubag Tata Usaha Dit.Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab: 1. Kota Tebing Tinggi 2. Kab. Serdang Begadai 3. Kab. Deli Serdang Kab. Labuhanbatu 4. Kab. Labusel 5. Kab. Asahan 6. Kab. Labuanbatu Utara 7. Kota Tanjungbalai 8. Kab. Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal 9. Kota Padang Sidempuan
9.	Puji Astuti Setyo Herawati, S.IP	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Setditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab: 1. Kab. Padang Lawas 2. Kab. Padang Lawas Utara 3. Kab. Tapanuli Utara 4. Kab. Tapanuli Tengah 5. Kota Sibolga 6. Kab. Nias 7. Kab. Nias Utara 8. Kab. Nias Barat 9. Kab. Nias Selatan 10. Kota Gunung Sitoli

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PROVINSI SUMATERA BARAT</b>			
10.	Sumiyati, S.Sos, M.Si	Kasi KTP Subdit Identitas Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Agam 2. Kab. Lima Puluh Kota 3. Kota Padang 4. Kota Payakumbuh 5. Kab. Padang 6. Pariaman 7. Kab. Pasaman Barat 8. Kota Pariaman 9. Kab. Pasaman 10. Kota Bukit Tinggi
11.	Monaliza, S.STP	Staf Subdit Identitas Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung jawab kab/kota: 11. Kota Padang Panjang 12. Kab. Tanah Datar 13. Kab. Sinjungjung 14. Kota Sawahlunto 15. Kab. Solok 16. Kab. Pesisir Selatan 17. Kota Solok 18. Kab. Kepulauan Mentawai 19. Kab. Solok Selatan 20. Kab. Dharmasraya
<b>PROVINSI RIAU</b>			
12.	Dra. Riama Duma Sirait, M.Si	Kasi Fasilitasi Pendataan Penduduk Wilayah I, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Riau dan Penanggung Jawab kab/kota:

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			1. Kab. Kampar 2. Kota Dumai 3. Kota Pekanbaru 4. Kab. Rokan Hilir 5. Kab. Kuantan Singgigi 6. Kab. Indra Giri Hulu 7. Kab. Indra Giri Hilir
13.	Lukman Hakim, S.Sos, M.Si	Kasi Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk Wilayah II, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab kab/kota : 1. Kab. Kepulauan Meranti 2. Kab. Bengkalis 3. Kab. Pelalawan 4. Kab. Rokan Hulu 5. Kab. Siak
<b>PROVINSI JAMBI</b>			
14.	Ir. Siti Nursiyah, M.Si	Kasubdit Identitas Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Jambi dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Muaro Jambi 2. Kota Jambi 3. Kab. Bungo 4. Kab. Tebo 5. Kab. Merangin 6. Kab. Sarolangun
15.	Felix Raharusun, S.STP	Staf Subdit Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab kab/kota: 7. Kab. Kerinci 8. Kota Sungai Penuh 9. Kab. Batang Hari 10. Kab. Tanjung Jabung Barat 11. Kab. Tanjung Jabung Timur

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>			
16.	Indersan, S.E, M.Si	Kasi Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk Wilayah I, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Sumatera Selatan dan Penanggung Jawab kab/kota:  1. Kab. Ogan Ilir 2. Kab. Ogan Komering Ilir 3. Kab. Banyu Asin 4. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 5. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 6. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7. Kab. Musi Banyuasin 8. Kab. Empat Lawang 9. Kab. Lahat 10. Kab. Muara Enim 11. Kota Palembang
17.	Martina E. Br.Situmorang, SH	Staf Subdit Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab kab/kota: 12. Kab. Ogan Komering Ulu 13. Kota Prabumulih 14. Kab. Lubuk Linggau 15. Kab. Musi Rawas 16. Kab. Musi Rawas Utara Kota Pagar Alam
<b>PROVINSI BENGKULU</b>			
18.	Kurniawan Prasetya. Atmaja, SH	Kasi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Bengkulu dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Bengkulu

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			Tengah 2. Kota Bengkulu 3. Kab. Rejang Lebong 4. Kab. Lebong 5. Kab. Kapahiang 6. Kab. Bengkulu Selatan 7. Kab. Kaur 8. Kab. Bengkulu Utara 9. Kab. Muko Muko 10. Kab. Seluma
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>			
19.	Dra. Rustinah, M.Si	Kasi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI, Subdit. Pindah Datang Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Lampung dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Lampung Tengah 2. Kab. Mesuji 3. Kab. Way Kanan 4. Kab. Lampung Selatan 5. Kab. Lampung Utara 6. Kab. Lampung Barat 7. Kab. Pesisir Barat 8. Kab. Tulang Bawang 9. Kab. Tulang Bawang Barat 10. Kab. Tanggamus 11. Kota Bandar Lampung 12. Kab. Lampung Timur 13. Kota Metro 14. Kab. Pringsewu 15. Kab. Pesawaran

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>			
20.	Rina Isnaeni N. Hidayati, S.Sos	Kasi Pindah Datang Penduduk Antar Negara, Subdit.Pindah Datang Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Belitung Kab. Belitung Timur 2. Kab. Bangka Tengah 3. Kab. Bangka Selatan 4. Kota Pangkal Pinang 5. Kab. Bangka 6. Kab. Bangka Barat
<b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
21.	Suwandi, S.Sos	Kasi Fasilitas Pendataan Penduduk, Wilayah II, Subdit Fasilitasi Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Kepulauan Riau dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Karimun 2. Kota Batam 3. Kab. Kepulauan Anambas 4. Kab. Lingga 5. Kab. Natuna 6. Kab. Bintan 7. Kota Tanjung Pinang
<b>WILAYAH II (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur)</b>			
22.	<b>Drs. H. Heru Tjahyono</b>	<b>Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Koordinator Wilayah II</b>
23.	Ir. Lydia Ismu Martyati Anny Miryanti	Kasubdit. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Dit. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Wakil Koordinator

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	Ida Aryani, SE, M.Si	Kasubdit Wilayah II, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
<b>PROVINSI DKI JAKARTA</b>			
25.	Shanti, S.Sos, MA	Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi DKI Jakarta dan Penanggung Jawab kab/kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Kepulauan Seribu</li> <li>2. Kota Administratif Jakarta Utara</li> <li>3. Kota Administratif Jakarta Barat</li> <li>4. Kota Administratif Jakarta Selatan</li> <li>5. Kota Administratif Jakarta Pusat</li> <li>6. Kota Administratif Jakarta Timur</li> </ol>
<b>PROVINSI JAWA BARAT</b>			
26.	Maharani, SP, MM	Kasubdit Layanan Teknis Data Kependudukan, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Provinsi Jawa Barat dan Penanggung Jawab kab/kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Bekasi</li> <li>2. Kota Bekasi</li> <li>3. Kab. Bandung</li> <li>4. Kab. Bandung Barat</li> <li>5. Kota Cimahi</li> <li>6. Kota Bandung</li> <li>7. Kab. Karawang</li> <li>8. Kab. Purwakarta</li> <li>9. Kab. Subang</li> <li>10. Kab. Kuningan</li> <li>11. Kota Cirebon</li> <li>12. Kab. Indramayu</li> </ol>

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			13. Kab. Cirebon 14. Kab. Bogor
27.	AA. Azhari, S.Kom	Kasi Lembaga Pengguna Pemerintah, Subdit Layanan Administrasi Data Kependudukan, Dit.Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab: 1. Kota Depok 2. Kab. Ciamis 3. Kab. Pangandaran 4. Kota Banjar 5. Kab. Sukabumi 6. Kota Sukabumi 7. Kab. Majalengka 8. Kab. Sumedang 9. Kab. Tasikmalaya 10. Kota Tasikmalaya 11. Kab. Garut 12. Kab. Cianjur 13. Kota Bogor
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>			
28.	Ati Kadarwati, SH, MH	Kasubdit Pencatatan Pewarganegaraan, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Jawa Tengah dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Pemasang 2. Kab. Tegal 3. Kab. Brebes 4. Kota Tegal 5. Kab. Banjar Negara 6. Kab. Purbalingga 7. Kab. Wonogiri 8. Kab. Sukoharjo 9. Kab. Karang anyar 10. Kab. Sragen 11. Kota Surakarta
29.	Mochammad Ridwan, S.Sos	Kasi Fasilitasi Pencatatan Pewarganegaraan Wilayah II, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Boyolali 2. Kab. Klaten 3. Kab. Semarang 4. Kota Salatiga

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
			5. Kota Semarang 6. Kab. Grobogan 7. Kab. Blora 8. Kab. Rembang 9. Kab. Jepara 10. Kab. Pati 11. Kab. Kudus 12. Kab. Demak
30.	Dra. Srie Roesiana Dwi Mardiaastutie, M.Si	Kasi Fasilitasi Pencatatan Pewarganegaraan Wilayah I, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Batang 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Kendal 4. Kota Pekalongan 5. Kab. Cilacap 6. Kab. Kebumen 7. Kab. Banyumas 8. Kab. Wonosobo 9. Kab. Purworejo 10. Kab. Temanggung 11. Kab. Magelang 12. Kota Magelang
<b>PROVINSI BANTEN</b>			
31.	Dra. Ni Luh Mertasih, M.Si	Kasubdit Pindah Datang Penduduk, Dit. Pendaftaran Penduduk	Penanggung Jawab Provinsi Banten dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Tangerang 2. Kota Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan 4. Kab. Serang 5. Kota Serang 6. Kota Cilegon 7. Kab. Lebak 8. Kab. Pandeglang

<b>PROVINSI D.I. YOGYAKARTA</b>			
32.	Dra. Endang Retnowati Sulistayaningsih	Kasi Fasilitas Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi D.I.Yogyakarta dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Sleman 2. Kab. Gunung Kidul 3. Kota Yogyakarta 4. Kab. Bantul 5. Kab. Kulon Progo
<b>PROVINSI JAWA TIMUR</b>			
33.	Adi Ardiansyah, SH	Kasi Monitoring dan Evaluasi, Subdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Jawa Timur dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Pasuruan 2. Kab. Probolinggo 3. Kab. Lumajang 4. Kota Probolinggo 5. Kota Pasuruan 6. Kab. Situbondo 7. Kab. Bondowoso 8. Kab. Banyuwangi 9. Kab. Jember 10. Kab. Bojonegoro 11. Kab. Lamongan 12. Kab. Tuban
34.	Anny Herawati, SE	Kasubag Tata Usaha. Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kota Surabaya 4. Kab. Blitar 5. Kab. Trenggalek 6. Kota Blitar 7. Kab. Malang 8. Kota Malang 9. Kota Batu 10. Kab. Bangkalan

			11. Kab. Sampang 12. Kab. Sumenep 13. Kab. Pamekasan
35.	Dra. Hindri Estysuluttia Rini	Kasi Fasilitasi Pencatatan Kematian, Subdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Dit. Pencatatan sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Nganjuk 2. Kab. Jombang 3. Kab. Mojokerto 4. Kota Mojokerto 5. Kab. Ponorogo 6. Kab. Pacitan 7. Kab. Kediri 8. Kab. Tulungagung 9. Kota Kediri 10. Kab. Madiun 11. Kab. Magetan 12. Kab. Ngawi 13. Kota Madiun
<b>WILAYAH III</b> <b>(Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara)</b>			
36.	<b>Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA</b>	<b>Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Koordinator Wilayah III</b>
37.	Nurlailawati, S.Ag, M.Si	Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator
38.	Ir. Endang Retno Werdiningsih, M.Si	Kasubdit Wilayah III Kependudukan, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>			
39.	Nurlailawati, S.Ag, M.Si	Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Barat dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Sambas 2. Kab. Bengkayang 3. Kab. Landak 4. Kab. Kapuas Hulu 5. Kab. Sintang 6. Kab. Melawi 7. Kab. Ketapang

40.	Drs. Petrus H. Hutauruk, MT	Kasi Fasilitasi Pencatatan Perceraian, Subdit Fasilitasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Kayong Utara 2. Kab. Mempawah 3. Kab. Kubu Raya 4. Kota Singkawang 5. Kota Pontianak 6. Kab. Sanggau 7. Kab. Sekadau
<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>			
41.	Ir. Diana Anggraeni M.Si	Kasi Pencatatan Kelahiran, Subdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan kematian, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Tengah dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Barito Utara 2. Kab. Murung Raya 3. Kab. Katingan 4. Kota Palangka Raya 5. Kab. Lamandau 6. Kab. Kotawaringin Barat 7. Kab. Sukamara
42.	Sundari, S.Sos	Kasi Perubahan Status Anak Wilayah II, Subdit Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Anak, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Pulang Pisau 2. Kab. Kapuas 3. Kab. Gunung Mas 4. Kab. Seruyan 5. Kab. Kotawaringin Timur 6. Kab. Barito Selatan 7. Kab. Barito Timur
<b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>			
43.	Sukirno, SH, M.Si	Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Anak, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Selatan dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Tanah Laut

			2. Kota Banjarmasin 3. Kab. Tanah Bumbu 4. Kab. Kota Baru 5. Kab. Tapin 6. Kab. Barito Kuala 7. Kab. Balangan
44.	Yeni Astarina, SH	Kasi Dokumentasi, Subdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Tabalong 2. Kab. Banjar 3. Kab. Banjar Baru 4. Kab. Hulu Sungai Tengah 5. Kab. Hulu Sungai Utara 6. Kab. Hulu Sungai Selatan

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

45.	Sakaria. SH, M.Si	Kasubdit Fasilitas Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Kalimantan Timur dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Kutai Kertanegara 2. Kab. Kutai Timur 3. Kota Samarinda 4. Kota Bontang 5. Kab. Kutai Barat 6. Kab. Mahakam Hulu 7. Kab. Berau 8. Kab. Penajam Paser Utara 9. Kab. Paser 10. Kota Balikpapan
-----	-------------------	---	--

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

46.	Sukoco, S.Sos, M.Si	Kasi Fasilitas Pencatatan Perubahan Status Anak Wilayah I, Dit. Pencatatan Sipil	Penanggungjawab Provinsi Kalimantan Utara dan Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Bulungan
-----	---------------------	--	--

			2. Kab. Malinau 3. Kota Tarakan 4. Kab. Nunukan 5. Kab.Tana Tidung
<b>WILAYAH IV</b>			
<b>(Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat )</b>			
47.	<b>DR. Ir. David Yama, M.Sc, MA</b>	<b>Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Koordinator Wilayah IV</b>
48.	Christina Lilik Sudarjati, SH, M.Si	Kasubdit Layanan Administrasi Data Kependudukan, Dit. Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Wakil Koordinator
49.	Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M.AP.	Kasubdit Wilayah IV, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
<b>PROVINSI SULAWESI UTARA</b>			
50.	Adjrung Rahmad, ST, M.Eng	Kasubdit Pengamanan Sistem, Dit.Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Provinsi Sulawesi Utara dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Bolaang Mongondow Timur 2. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3. Kab. Minahasa Utara 4. Kota Manado 5. Kota Bitung 6. Kab. Sangihe 7. Kab. Talaud 8. Kab. Kepulauan Siao Tagulandang Biaro

51.	Dra. Dwi Puspita Rini, M.Si	Kasi Monitoring dan Evaluasi, Subdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab: 1. Kab. Minahasa Tenggara 2. Kab. Minahasa Selatan 3. Kab. Bolaang Mongodow 4. Kab. Bolaang Mongodow Utara 5. Kota Kotamubago 6. Kab. Minahasa 7. Kota Tomohon
<b>PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>			
52.	Ir. FX. Garmaya Sabarling, MM	Subdit Keamanan Informasi, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Provinsi Sulawesi Tengah dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Tojo Una-Una 2. Kab. Poso
53.	Asep T. Firdaus, S.STP, M.Si	Kasi Teknologi dan Personalisasi, Subdit Keamanan Informasi, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Parigi Moutong 2. Kab. Donggala 3. Kab. Sigi 4. Kota Palu 5. Kab. Banggai Laut
54.	Sunarno, S.Sos	Kasi Tata Kelola, Subdit. Subdit Keamanan Informasi, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab: Kab. Banggai Kepulauan 1. Kab. Banggai 2. Kab. Morowali 3. Kab. Morowali Utara 4. Kab. Buol 5. Kab. Toli-Toli
<b>PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>			
55.	Sutrisno, S.Sos, M.Si	Kasubdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Provinsi Sulawesi Selatan dan Penanggung Jawab kab/kota:

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Maros</li> <li>2. Kab. Pangkep</li> <li>3. Kab. Barru</li> <li>4. Kab. Bone</li> <li>5. Kab. Sinjai</li> <li>6. Kota Makassar</li> <li>7. Kab. Luwu Utara</li> <li>8. Kab. Luwu Timur</li> </ol>
56.	Lisnawati Rivai, S.Pd, M.Si	Kasi Dokumentasi, Subdit Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Dit.Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Kab/Kota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Gowa</li> <li>2. Kab. Takalar</li> <li>3. Kab. Sidrap</li> <li>4. Kab. Enrekang</li> <li>5. Kab. Soppeng</li> <li>6. Kab. Wajo</li> <li>7. Kab. Jeneponto</li> <li>8. Kab. Bantaeng</li> </ol>
57.	Sigit Samptoaji, S.Si, M.TI	Kasi Aplikasi, Subdit Pengaman Sytem, Dit.Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Pinrang</li> <li>2. Kota Pare Pare</li> <li>3. Kab. Luwu</li> <li>4. Kota Palopo</li> <li>5. Kab. Bulukumba</li> <li>6. Kab. Selayar</li> <li>7. Kab. Toraja</li> <li>8. Kab. Toraja Utara</li> </ol>
<b>PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>			
57.	Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M.AP	Kasubdit Wilayah IV, Dit.Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penanggung Jawab Kab/Kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Konawe</li> <li>2. Kab. Konawe Utara</li> <li>3. Kota Kendari</li> <li>4. Kab. Buton</li> <li>5. Kota Bau-Bau</li> <li>6. Kab. Konawe Selatan</li> <li>7. Kab. Bombana</li> </ol>
58.	Petra Dolok Marombun L, MH	Kasi Lembaga Pengguna Pemerintah, Subdit Layanan Administrasi Data Kependudukan, Dit.Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Kab/Kota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Muna</li> <li>2. Kab. Buton Utara</li> <li>3. Kab. Konawe Kepulauan</li> <li>4. Kab. Kolaka</li> </ol>

59.	Sri Mulyani, S.Kom, MM	Kasi Lembaga Pengguna Non Pemerintah, Subdit Layanan Teknis Data Kependudukan, Dit.Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab: 5. Kab. Kolaka Timur 6. Kab. Kolaka Utara 7. Kab. Wakatobi
<b>PROVINSI GORONTALO</b>			
60.	Christina Lilik Sudarijati, SH, M.Si	Kasubdit Layanan Administrasi Data Kependudukan, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Provinsi Gorontalo Penanggung Jawab Kab/kota: 1. Kab. Gorontalo 2. Kota Gorontalo 3. Kab. Gorontalo Utara
61.	Zadli Hairudin Tukuboya, S.STP, M.Ec, Dev	Kasi Infrastruktur, Subdit Pengamanan Sistem, Dit.Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Kab/kota: 4. Kab. Boalemo 5. Kab. Bone Bolango 6. Kab. Pohuwato
<b>PROVINSI SULAWESI BARAT</b>			
62.	Rachmat Hendrawan Akbari, SH, MH	Kasi Lembaga Pengguna Non Pemerintah, Subdit Layanan Administrasi Data Kependudukan, Dit.Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab Provinsi Sulawesi Barat Penanggung Jawab Kab/kota: 1. Kab. Polewali Mandar 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Majene 4. Kab. Mamasa 5. Kab. Mamuju Utara 6. Kab. Mamuju Tengah
<b>WILAYAH V (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)</b>			
63.	<b>Joko Moersito, SH, MH.</b>	<b>Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Koordinator Wilayah V</b>
64.	Ir. Rara Yusnani H, M.Si.	Kasubdit Wilayah V, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator

65.	Ir. Rara Yusnani H, M.Si.	Kasubdit Wilayah V, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
<b>PROVINSI BALI</b>			
66.	Woro Wresti Widayati, S.Sos	Kasi Wilayah VA, Subdit Wilayah V, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab: Provinsi Bali 1. Kab. Badung 2. Kota Denpasar 3. Kab. Karang Asem 4. Kab. Klungkung 5. Kab. Gianyar 6. Kab. Bangli 7. Kab. Buleleng 8. Kab. Tabanan 9. Kab. Jembrana
<b>PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>			
67.	Maryamah, SE	Kasi Wilayah IVA, Subdit Wilayah IV, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Nusa Tenggara Barat 1. Kab. Lombok Timur 2. Kota Mataram 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Lombok Tengah 5. Kab. Lombok Barat 6. Kab. Bima 7. Kab. Dompu 8. Kab. Sumbawa 9. Kab. Sumbawa Barat 10. Kota Bima
<b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
68.	Muhammad Nur, SE	Kasi Wilayah 1B, Subdit Wilayah I, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Nusa Tenggara Timur Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Sumba Barat 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Sumba Tengah 4. Kab. Sumba Barat Daya

			5. Kab. Kupang 6. Kota Kupang 7. Kab. Alor
69.	Kornelis Bauleki	Kasi Wilayah IB, Subdit Wilayah I, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Belu Kab. Nagekeo Kab. Ngada Kab. Ende Kab. Sikha Kab. Lembata
70.	Mella Oktafiani, SE, M.Si	Kasi Wilayah VB, Subdit Wilayah V, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab: 1. Kab. Rotendao 2. Kab. Sabu Raijua 3. Kab. Malaka 4. Kab. Flores Timur 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Manggarai Timur 7. Kab. Manggarai Barat
<b>PROVINSI MALUKU</b>			
71.	Endah Lestari, Dipl.	Kasi Wilayah IVB, Subdit Wilayah IV, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab: Provinsi Maluku Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Maluku Tenggara Barat Daya 2. Kota Tual 3. Kab. Maluku Tengah 4. Kab. Seram Bagian Timur 5. Kab. Seram Bagian Barat 6. Kab. Maluku Tenggara 7. Kab. Kepulauan Aru 8. Kab. Buru 9. Kab. Buru Selatan 10. Kab. Maluku Tenggara Barat

			11. Kota Ambon
<b>PROVINSI MALUKU UTARA</b>			
72.	Yuning Sri Harjati, SE	Kasi Wilayah IIIA, Subdit Wilayah III, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab: Provinsi Maluku Utara Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Halmahera Timur 2. Kab. Halmahera Barat 3. Kab. Pulau Morotai 4. Kab. Halmahera Utara 5. Kab. Halmahera Tengah 6. Kota Ternate 7. Kab. Halmahera Selatan 8. Kota Tidore Kepulauan 9. Kab. Kepulauan Sula 10. Kab. Taliabu
<b>PROVINSI PAPUA</b>			
73.	Ahmad Ridwan, SE, M.Si	Kasi Wilayah IIB, Subdit Wilayah II, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Papua dan Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Biak 2. Kab. Supiori 3. Kab. Kep. Yapen 4. Kab. Waropen 5. Kab. Mimika 6. Kab. Asmat
74.	Nyoto, S.Sos, M.Si	Kasi Wilayah IIIB, Subdit Wilayah III, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab kab/kota: 1. Kab. Boven Digul 2. Kab. Puncak 3. Kab. Nabire 4. Kab. Dogiyai 5. Kab. Deiyai 6. Kab. Paniai 7. Kab. Mappi 8. Kab. Merauke 9. Kab. Intan Jaya

75.	Dian Handayani, SE, M.Si	Kepala Seksi Teknologi dan Personalisasi, Subit Keamanan Informasi, Dit. Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penanggung Jawab: 1. Kab. Yalimo 2. Kab. Jayawijaya 3. Kab. Mamberamo 4. Tengah 5. Kab. Nduga 6. Kab. Yahukimo 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Tolikara 9. Kab. Pegunungan Bintang 10. Kab. Mamberamo Raya 11. Kab. Jayapura 12. Kab. Keerom 13. Kab. Sarmi 14. Kab. Puncak Jaya 15. Kota Jayapura
<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>			
76.	Syamsudin, SE	Kasi Wilayah IIA, Subdit Wilayah II, Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Provinsi Papua Barat Dan Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Sorong 2. Kab. Raja Ampat 3. Kota Sorong 4. Kab. Tambrauw 5. Kab. Sorong Selatan
77.	Bastian Jacob Seimahuira	Staf Dit. Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab kab/kota: 1. Kab. Maybrat 2. Kab. Teluk Wondama 3. Kab. Teluk Bintuni 4. Kab. Manokwari 5. Kab. Manokwari Selatan 6. Kab. Peg. Arfak 7. Kab. Kaimana 8. Kab. Fak Fak

An. MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 DIREKTUR JENDERAL  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

  
 Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.